

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas mengenai **Pemerintah Prancis pada era kepemimpinan François Hollande mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina pada periode 2012-2016**. Dinamika keamanan internasional ternyata tidak lepas dari konflik, baik konflik antar negara ataupun konflik yang terjadi dalam lingkup domestik yang dikenal dengan perang sipil (*civil war*). Salah satu konflik yang mengemuka periode 2012-2016 adalah konflik Israel-Palestina. Konflik ini ternyata menjadi salah satu konflik terlama yang dimulai sejak tahun 1948 yang memperebutkan otoritas tanah.

Konflik Israel-Palestina bermula ketika pada tanggal 14 Mei 1948, Israel menyatakan kemerdekaannya dan memiliki wilayah teritorial yang telah ditentukan oleh *United Nations Special Committee on Palestine* (UNSCOP) yang ditunjuk secara langsung oleh *United Nations General Assembly*.¹ Sejak saat itu, untuk memperluas dan menguasai Palestina berbagai usaha dan cara dilakukan oleh Israel untuk memperluas wilayahnya. Sedangkan bangsa Palestina mengatakan bahwa wilayah atau tanah tersebut milik mereka karena selama ratusan tahun telah menempati tempat tersebut dan fakta bahwa mereka merupakan penduduk yang mayoritas. Faktor selanjutnya yang membuat konflik Israel-Palestina semakin berlanjut adalah faktor Teologis yang melibatkan agama yaitu Islam dan Yahudi.

¹ UN Partition Plan - Resolution 181 (1947), <http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/1947%20UN%20Partition%20Plan.aspx> Di akses pada 24 Desember 2016

Selain itu unsur politik juga ikut mempengaruhi konflik di antara kedua negara tersebut.

Seiring dengan berkembangnya waktu, konflik Israel-Palestina menjadi persoalan yang berlatrur-larut. Beberapa momentum dan insiden yang terjadi sejak tahun 2000 diantaranya adalah:² **Pertama**, pada bulan Maret tahun 2000, Ariel Sharon merupakan pemimpin oposisi Israel melakukan kunjungan ke Masjidil Aqsa menyebabkan pemicu kerusuhan. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu tempat suci umat Islam. Intifadah gelombang kedua pun dimulai. **Ke-dua**, Maret-April 2002 Israel membangun Tembok Pertahanan di Tepi Barat dan terjadi serangkaian serangan bunuh diri Palestina. **Ke-tiga**, Juli 2004 Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan batas pertahanan yang menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkannya. **Ke-empat**, Agustus 2005 Israel keluar dari permukiman Gaza dan empat wilayah permukiman di Tepi Barat. **Ke-lima**, Januari-Juli 2008 ketegangan situasi dan kondisi di Gaza meningkat. Kemudian Israel memutus suplai listrik dan gas. Pihak Internasional menuding Hamas tidak berhasil mengendalikan tindak kekerasan antara Israel dan Palestina. Sementara itu, PM Palestina Ismail Haniyeh berkeras bahwa pihaknya tidak akan tunduk. **Ke-enam**, November 2008 Hamas batal ikut serta dalam pertemuan unifikasi Palestina yang diadakan di Kairo, Mesir. Terjadi serangan roket kecil di wilayah Israel. **Ke-tujuh**, Serangan Israel ke Gaza dimulai 26 Desember 2008. **Ke-delapan**, Israel melancarkan Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan

² Laura Zeitein Eisenberg, 2012, *Negotiating of Arab Israely Peace : Third Edition*, Bloomington : Indianapolis University Publishing, hal.19-20.

serangan udara ke pusat-pusat operasi Hamas. Korban dari warga sipil berjatuhan. **Ke-sembilan** Mei 2010 Israel mem-blokede seluruh jalur bantuan menuju palestina, dan pada 30 Mei 2010 Tentara Israel Menembaki kapal bantuan *Mavi Marmara* yang membawa ratusan Relawan dan belasan ton bantuan untuk Palestina.

Konflik Israel dan Palestina kemudian berkembang menjadi isu internasional karena ketidakmampuan dari kedua pihak tersebut untuk menyelesaikan konflik. Kemudian menyebabkan aktor lain masuk, salah satunya adalah Prancis yang merupakan negara yang memiliki tingkat perekonomian terbesar ke-enam di dunia pada tahun 2015 dengan GDP sebesar USD 2,418,836³ dan jumlah populasi sekitar 66,689,000 jiwa pada tahun 2016⁴. Salah satu rezim yang bersikap pro-aktif terhadap rekonsiliasi konflik Israel-Palestina adalah François Hollande yang merupakan presiden Prancis ke-24 yang berhasil menggantikan Nicolas Sarkozy yang masa jabatannya habis pada bulan Mei 2012.⁵

Kepemimpinan François Hollande juga memiliki peran yang lebih dominan jika dibandingkan dengan dengan kepemimpinan sebelumnya yaitu Nicholas Sarkozy tahun (2007-2012). Hal ini dapat dilihat dari frekuensi implementasi kebijakan dan pembicaraan-pembicaraan politik tentang Palestina yang memiliki jumlah yang berbeda. Hollande berhasil merumuskan kebijakan di tingkat parlemen

³ World Development Indicators database, World Bank, 1 February 2017, <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

⁴ World Population Review: France Population, <http://worldpopulationreview.com/countries/france-population/> Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

⁵ List of France President, <https://www.britannica.com/topic/list-of-presidents-of-France-2060874>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2017.

sebanyak 28 kali sepanjang periode 2012-2016, sedangkan Sarkozy hanya merumuskan kebijakan sebanyak 7 kali pada periode 2007-2012 dan dalam kepemimpinannya Sarkozy cenderung menjadikan persoalan Israel-Palestina sebagai bagian dari dinamika wilayah timur-tengah secara umum yang ditandai dengan adanya kebijakan *The Union of the Mediterranean* sebagai *inter alia*, mencoba menengahi antara pemerintah Libanon dan Hizbullah (organisasi politik di Libanon), konflik Israel-Palestina, dan mulai memperbaiki hubungan dengan Suriah.⁶ Kemudian sikap pro-aktif Hollande juga dapat dilihat dari inisiatifnya dalam memasukan konflik Israel-Palestina dalam pembicaraan pada level Uni Eropa. Sedangkan pada kepemimpinan Sarkozy upaya ini kurang dijalankan. Selain itu, pada kepemimpinan Hollande pemerintah Prancis juga telah mengeluarkan anggaran lebih dari 28 juta US dollar, sedangkan Sarkozy hanya mengeluarkan anggaran bersamaan dengan konsorsium Uni Eropa dalam mendukung perdamaian Israel-Palestina.⁷

François Hollande adalah Presiden sosialis Prancis yang kemudian berhasil mengangkat JeanMarc Ayrault yang berasal dari Partai Sosialis sebagai Menteri Luar Negeri Prancis dan Pembangunan Internasional, JeanMarc Ayrault mengambil inisiatif secara politik sebagai penengah atau mediator dalam kasus Konflik Israel-Palestina karena situasi di kedua negara tersebut memburuk yang disebabkan kurangnya kemauan maupun inisiatif untuk melakukan negosiasi.⁸ Kiprah Prancis

⁶ Abdul ruff, "The France Peace Initiative of Israel-Palestine Conflict", The Journal of Resolved, VI III, Charleston School of Law, Charleston-St Mary, 2016, chapter iv.

⁷ Charleston School of Law, *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

dalam mendukung perdamaian konflik Israeal-Palestina diantaranya diwujudkan melalui inisiatif Pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Hollande dengan berupaya mengajak negara-negara anggota Uni Eropa lainnya sudah lama berupaya menentang adanya *national interest* mereka sendiri di kawasan Timur Tengah. Prancis telah berupaya mendamaikan negara-negara Arab dan Islam salah satunya dengan terus-menerus mendukung kebijakan pro-Palestina dan anti-Israel. Prancis percaya bahwa dengan adanya kebijakan tersebut akan membuat para teroris muslim tidak akan menargetkan negara serta kepentingan Prancis.⁹

Upaya mediasi Prancis diwujudkan dengan mengangkat Palestina sebagai *General Delegation* di Prancis. Pada bulan November 2012, mendukung Palestina sebagai pengamat Negara non-anggota di PBB, dan pada bulan September 2015 untuk didirikannya bendera Palestina di PBB.¹⁰ Selain itu, pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Hollande juga menjalankan berbagai negosiasi secara terus-menerus dilakukan oleh berbagai pihak seperti PBB dan negara-negara lainnya sebagai upaya terjadinya perdamaian dan menghentikan pertikaian di antara kedua negara tersebut. Dengan melihat peran Prancis yang berinisiatif sebagai mediator menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan sejak awal tahun 1990-an mengalami kegagalan karena kurangnya kemauan atau ketegasan para pemimpin Israel dan Palestina untuk melakukan perdamaian. Analisis yang dilakukan

⁹ What France and Europe Might Learn, <https://www.gatestoneinstitute.org/6881/paris-attacks-lessons> Di akses pada 12 Desember 2016

¹⁰ Peace Process, <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/article/israel-palestine-understand-france-s-position-in-nine-points> Di akses pada 28 November 2016

terhadap konflik Israel-Palestina akan difokuskan pada masa pemerintahan François Hollande.

Pada masa pemerintahan François Hollande, Prancis berinisiatif melakukan *Middle East Peace Process* dengan tujuan membuka jalan perdamaian di antara Israel dan Palestina dan mempertemukan keduanya untuk melakukan perundingan pada 30 Mei 2014. Pertemuan itu dilakukan karena rencana perdamaian dengan Arab pada tahun 2002 ditolak oleh Israel.¹¹ Adanya inisiatif pada masa pemerintahan Hollande untuk melakukan negosiasi secara berlanjut setelah sempat terhenti pada tahun 2014 dan berbagai hambatan-hambatan dalam mencapai solusi untuk melakukan perdamaian pada konflik ini. Menteri Luar Negeri Prancis pada periode sebelumnya yaitu Laurent Fabius, pada 29 November 2014 telah melakukan pendesakkan masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam jangka waktu dua tahun. Dalam PBB Prancis juga melakukan upaya-upaya untuk mengesahkan sebuah resolusi Dewan Keamanan agar dapat menyelesaikan perundingan.¹²

Peran selanjutnya dalam mendukung perdamaian konflik Israel-Palestina diwujudkan melalui program pembebasan tahanan. Terkait hal ini pihak Prancis mengeluarkan pernyataannya kepada pemerintah Israel agar segera membebaskan masyarakat Palestina yang diperkirakan berjumlah 300 hingga 400 orang untuk dapat mendukung percepatan peta jalan damai (*road peace map*) yang telah dirintis

¹¹ France to convene Middle East peace conference on May 30 , <http://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-france-idUSKCN0XI26T> Di akses pada 06 Desember 2016

¹² Prancis minta konflik Israel-Palestina diselesaikan dalam dua tahun, <http://www.antarane.ws.com/berita/466758/prancis-minta-konflik-israel-palestina-diselesaikan-dalam-dua-tahun> Di akses pada 05 Juni 2016.

Prancis sejak tahun 2014. Kemudian peran Prancis lainnya dalam mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah dengan memperkuat posisi Palestina dalam konstelasi politik internasional. Ini dapat dilihat dari inisiatif Prancis untuk memasukan Palestina dalam keanggotaan PBB. Selain itu, Prancis pada bulan September 2015 juga berhasil mengibarkan bendera Palestina di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.¹³

Pada tanggal 3 Juni 2016, telah dilakukan sebuah Konferensi Internasional di Paris yang dihadiri oleh 28 negara. Dalam persidangan tersebut membahas sebuah solusi yang dapat menghentikan perselisihan di antara Israel dan Palestina. Dengan demikian, Prancis termasuk negara yang menyerukan Israel untuk sepenuhnya menarik diri. *Two State Solution* merupakan solusi yang digunakan untuk menengahi konflik, solusi ini mampu menawarkan prospek yang diinginkan dari kedua negara yang sedang berkonflik demi tercapainya keamanan, kemerdekaan, pengakuan serta kehormatan. Dengan adanya solusi tersebut, Prancis dan anggota-anggota Uni Eropa telah menyusun parameter yang diperlukan untuk terjadinya resolusi konflik. Ban Ki-Moon, yang merupakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan pendapatnya mengenai *two-state solution*:

"Over the years, we have seen determined efforts to achieve a comprehensive, negotiated peace based on a two-state solution. Instead of peace, however, there have been decades of missed opportunities and

¹³ Israel/Palestine: Understand France Position in Nine Pint, <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017.

*failures that have come at an enormous human cost. The prospect of a two-state solution continues to recede, with potentially explosive consequences. In the coming weeks, a new Israeli Government will be formed. I strongly urge the incoming Government to reaffirm Israel's commitment to the two-state solution and to take credible steps to foster an environment conducive to a return to meaningful negotiations, including a freeze of settlement activity.”*¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada periode 2012-2016 konflik Israel-Palestina masih menjadi isu keamanan yang mengemuka. Kemudian ini mendorong pemerintah Prancis pada era kepemimpinan Hollande untuk mendukung rekonsiliasi konflik dan peran ini ternyata tidak sekedar menjadi eforia politik, namun dijalankan dengan memperhatikan entitas dalam dan luar negeri sehingga menjadi bentuk kebijakan luar negeri yang efektif dan legitimitet sebagai bagian dari rekonsiliasi konflik Israel-Palestina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan pertanyaannya adalah sebagai berikut:

“Mengapa Prancis pada era kepemimpinan François Hollande mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina pada periode 2012-2016 ?”

¹⁴Ban Ki-Moon, MPA Biography, <http://israelipalestinian.procon.org/view.source.php?sourceID=4906> Di akses 25 Desember 2016

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjelaskan untuk menjelaskan latar belakang masalah yang dibahas penulis menggunakan kerangka teori, yaitu teori teori pembuatan kebijakan luar negeri dan teori kepentingan nasional. Kedua teori ini dipandang relevan dengan kasus yang sedang dibahas karena mampu menjabarkan secara terperinci tentang alasan pemerintah Prancis pada era kepemimpinan François Hollande secara aktif ikut mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina pada periode 2012-2016.

1. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri

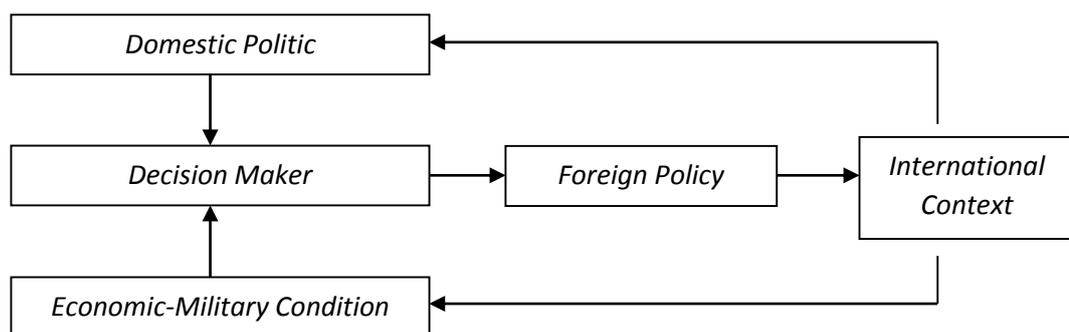
Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari serangkaian keputusan berdasarkan kepentingan nasional. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain.

Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah Prancis dalam menyikapi konflik Israel-Palestina maka pendekatan yang akan digunakan adalah dengan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politic*". Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan berdasarkan pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Menurut Coplin, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri.

Pertama, politik dalam negeri dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan; Kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara; Ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu khususnya dalam hubungan dengan negara lain dalam suatu sistem.¹⁵ Untuk membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara, William D.Coplin menggambarkan sebuah model teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri:

Gambar 1. 1 Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri



Sumber: William de Coplin, "Introduction to International Politic", dalam Yusuf Sufri, 1992, *Hubungan Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, Bandung : CV. Sinar Baru, hal. 30

a. Sifat Sistem Pengaruh Kebijakan

Sistem pengaruh kebijakan atau *Policy influence system* suatu negara dapat dianggap sebagai serangkaian hubungan timbal balik yang sangat kompleks, di antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*-nya. *Policy influencer*

¹⁵ William D.Coplin dan Marsedes Marbun. *Pengantar Poliitik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke-2. 2003.30

dibutuhkan dalam suatu pihak pengambil keputusan karena merupakan sumber dukungan bagi rezim mereka.

Untuk melakukan analisis struktur sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*) serta peran sistem tersebut dalam perumusan politik luar negeri, maka ada dua konsep yang akan memberikan kerangka dasar untuk menganalisis peran politik dalam negeri terhadap tindakan politik luar negeri suatu negara. Rangkaian konsep pertama didasarkan atas perbedaan sistem politik terbuka dari sistem politik tertutup. Rangkaian konsep kedua terdiri dari empat kategori *policy influencer system*, yaitu: (1) partisan, (2) birokratis, (3) kepentingan, dan (4) *mass influencer*.

Pada rangkaian konsep pertama menurut R. Barry Farrell istilah sistem politik terbuka digunakan sebagai sinonim bagi demokrasi konstitusional yang memiliki karakteristik pemilihan dilakukan secara reguler yang bersifat kompetitif, legalisasi dua atau lebih organisasi yang bertujuan menggantikan kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan, memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap kelompok-kelompok autonom dalam politik, dan adanya kesepakatan terhadap aturan-aturan konstitusional bagi penguasa pemerintahan. Sedangkan pada sistem politik tertutup dapat ditandai dengan adanya suatu ideologi resmi, terdiri atas partai tunggal yang persentase seluruh populasinya relatif kecil, suatu sistem yang dikendalikan oleh polisi yang bersifat teoritis, penguasaan partai atas hampir seluruh sarana komunikasi massa yang efektif, demikian pula alat-alat persenjataan, dan seluruh arah perekonomian dikontrol dari pusat, khususnya yang meliputi

berbagai asosiasi dan kelompok-kelompok kerja.¹⁶ Dalam hal ini, perbedaan sifat sistem terbuka dan tertutup dapat menempatkan semua negara ke dalamnya meskipun terkait dengan kebijakan politik.

Dengan mengetahui karakteristik sifat sistem, Prancis merupakan negara yang termasuk golongan sistem terbuka. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, melakukan pergantian Presiden selama lima tahun sekali, merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Sekretariat Komunitas Pasifik (SPC) dan Komisi Samudera Hindia (COI), anggota terkait Asosiasi Negara Karibia (ACS), dan anggota utama organisasi Francophone International (OIF).

1. Partai yang mempengaruhi

Influencer ini bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dalam sistem politik terbuka, dapat ditemukan sejumlah *partisan influencer* seperti Prancis yang berasal dari partai sosialis yang lebih memiliki rasa simpati dan empati terhadap individu-individu lainnya tanpa memandang status. Sehingga peran Prancis dalam melakukan mediasi terhadap konflik Israel-Palestina berkaitan dengan latar belakang partai Prancis itu sendiri.

¹⁶ R. Barry Farrell, “*Foreign Policies of Open and Closed Political Societies*”, dalam *Approaches to Comparative and International Politics*, ed. Farrell (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1966) hal. 168.

2. Birokrat yang mempengaruhi

Bureaucratic influencer (birokrat yang mempengaruhi) untuk menunjuk kepada berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan. Bureaucratic influencer dapat mempengaruhi hasil proses pengambilan keputusan anggota-anggota kelompok influencers.

3. Kepentingan yang mempengaruhi

Interest influencer terdiri dari sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama. Kebanyakan kepentingan ini bersifat ekonomis karena sering dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif melalui persamaan kepentingan ekonomi. Kepentingan-kepentingan yang bersifat non-ekonomis juga dapat digunakan sebagai dasar bagi tindakan kolektif, terutama apabila ada ikatan etnis atau geografis di antara mereka. Sifat dan taktik *interest influencer* ini berbeda-beda berdasarkan tipe sistem politik yang dimiliki, yaitu sistem politik tertutup dan sistem politik terbuka.

Prancis memiliki sistem politik yang terbuka, memainkan peran yang lebih besar dan mewakili berbagai kepentingan yang bersifat non-ekonomis. Karena Prancis memiliki sumber finansial yang besar dan mampu mempengaruhi para pemilih serta *partisan influencer*. Sebagai mediator, Prancis juga harus terlepas dari kepentingan nasional yang diinginkan di kedua wilayah yang sedang berkonflik yaitu Israel dan Palestina karena salah satu faktor untuk menjadi

seorang mediator adalah tidak memiliki kepentingan pribadi maupun negara di wilayah yang sedang ditangani.

4. Massa yang mempengaruhi

Mass influencers mengacu kepada opini publik yang dapat dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Dampak sikap *mass influencers* bagi pihak pengambilan kebijakan keputusan dapat dilihat dari tipe sistem politik luar negerinya. Dari segi sistem politik tertutup, sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh para pembuat keputusan itu sendiri melalui media komunikasi massa seperti surat kabar, radio, televisi, serta partai yang pro-rezim para pengambil kebijakan keputusan. Namun, media massa biasanya dikontrol dari atas, dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat biasanya ikut dibatasi melalui sensor. Sehingga para pengambil keputusan dalam sistem tertutup berpeluang besar untuk memanipulasi. Dalam sistem terbuka, opini publik lebih bebas dan dapat terhindar dari manipulasi langsung para pengambil keputusan. Di Prancis, opini publik sangat berpengaruh dalam melakukan pengambilan keputusan. Misalnya, Masyarakat muslim dan organisasi islam di Prancis telah melakukan berbagai cara untuk mendukung dan mendorong pemerintah mendukung Palestina. Berdasarkan survey dari 10.000 pemilih masyarakat Prancis dilakukan jajak pendapat oleh pihak *OpinionWay*¹⁷ yang hasilnya 93%

¹⁷ OpinionWay-Fiducial pour Le Figaro- Sondage jour du vote au second tour – Présidentielle 2012 - 6 Mai 2012. Diakses pada 27 Desember 2016

masyarakat Muslim Prancis memilih François Hollande pada 6 Mei 2012. Sebaliknya hanya 7% dari masyarakat Muslim Prancis yang memilih Nicolas Sarkozy.¹⁸ Dalam bidang ideologi, sosialis dan Muslim umumnya memiliki rasa simpati, empati yang sama, memiliki nilai-nilai di dalam kehidupan dan saling mendukung satu sama lain.

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Ekonomi dan militer merupakan dua variable yang saling berkaitan satu sama lain. Analisa Coplin mengenai faktor ekonomi dan militer ini diambil berdasarkan perilaku raja-raja di Eropa abad pertengahan. Coplin menggambarkan ketika kemampuan militer meningkat maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi, dan jika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya.¹⁹

Dalam bidang militer, Coplin menerangkan dengan 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya.²⁰ Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah

¹⁸ Muslim Voters Change Europe, <https://www.gatestoneinstitute.org/3064/muslim-voters-europe> Di akses pada 27 Desember 2016.

¹⁹ William D. Coplin *op. cit.* hal 112.

²⁰ *Ibid* hal 124.

satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.²¹. Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam dunia politik internasional.

Prancis merupakan negara yang memiliki tingkat perekonomian terbesar kelima di dunia dan memiliki kekuatan militer yang kuat terutama pada angkatan militer udara dan laut. Memiliki 600 pesawat dan helikopter tempur, 228 tentara dan lebih dari 8.000 kendaraan lapis baja. Sementara di laut, tepatnya di daerah jantung benua Eropa memiliki sebuah kapal induk bertenaga nuklir. Dengan memiliki kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, Prancis sangat berhati-hati dalam melakukan setiap keputusan dan tindakan yang akan diambil mengingat berbagai ancaman dapat muncul dalam berbagai situasi yang mungkin tidak diharapkan pada era globalisasi. Salah satu konsep penting dari keamanan nasional Prancis adalah pencegahan penggunaan nuklir, hal ini dilakukan sebagai jaminan utama keamanan Prancis. Prancis sangat berupaya untuk melakukan pencegahan konflik dan intervensi pada daerah Timur-Tengah, Arab – Teluk Persia, Atlantik, dan Samudera Hindia karena bagi Prancis dalam segi geografis memiliki implikasi yang besar.

²¹ Budi Winarno. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: Buku Seru, 2011.

c. Konteks Internasional

Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis²². Lingkungan internasional bagi setiap negara merupakan wilayah yang ditempati dan berkaitan dengan lokasi yang berhubungan dengan negara-negara lain di dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik, dan geografi yang memainkan peranan penting. Faktor geografi merupakan yang utama dalam terciptanya organisasi lintas negara sehingga tercipta hubungan politik dan ekonomi antar sesama negara anggota, sebagai contoh Uni Eropa, NATO, ASEAN dan lain-lain. Prancis merupakan salah satu anggota dan sekaligus pendiri Uni Eropa dan memiliki 74 anggota parliamen. Dewan Uni Eropa dan menteri-menteri nasional melakukan pertemuan yang telah diatur secara reguler, menerapkan undang-undang dan mengkoordinasi kebijakan terhadap negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

D. Hipotesa

Prancis pada era kepemimpinan François Hollande mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina pada periode 2012-2016 disebabkan oleh pergeseran politik dalam negeri yakni dari Partai Republik dari Moderat-Kanan di bawah pemerintahan Nicolas Sarkozy menjadi Partai Sosialis dari Moderat-Kiri di bawah pemerintahan François Hollande.

²² William D.Coplin Hal. 167

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berkaitan dengan sifat data yang sekunder yaitu metode kualitatif yaitu sebuah metode analisa data-data yang sifatnya non-angka, data-data ini berupa pernyataan, berita, laporan. Jika terdapat tabel, skema dan diagram yang sifatnya kuantitatif, hal ini hanya untuk memperkuat deskripsi analisa saja, dan bukan merupakan hasil akhir. Sementara teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*).

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan. Data-data yang telah dikumpulkan merupakan data-data sekunder, yang artinya dalam penulisan ini penulis tidak menjalankan observasi (penelitian) langsung namun lebih mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, yang diolah melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui:

1. Buku-buku
2. Surat Kabar dan Majalah
3. Jurnal Sosial Politik dan Artikel
4. Internet (*Web Site*).

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang alasan pemerintah Prancis pada era kepemimpinan François Hollande secara aktif ikut mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina pada periode 2012-2016.
- b. Untuk mengetahui tentang dinamika terkini tentang konflik Israel-Palestina serta berbagai perundingan dan upaya-upaya masyarakat internasional dalam ikut mendukung penyelesaian masalah ini yang ternyata belum berjalan secara efektif.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi penulisan ini pada tahun 2012-2016. Dilipih periode tersebut karena menunjukkan masa kepemimpinan dari François Hollande, sekaligus sebagai periode yang menunjukkan berbagai upaya Prancis dalam ikut mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevanan dengan tema yang sedang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab untuk mempermudah penyusunan bahasan dan uraian-uraian. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pada BAB II membahas mengenai Prancis terhadap konflik Israel-Palestina. BAB III merupakan bab yang membahas Politik Luar Negeri Prancis dari pemerintahan Nicholas Sarkozy ke pemerintahan Francois Hollande. Bab IV Faktor yang mempengaruhi Francois Hollande mendukung penyelesaian Konflik Israel-Palestina. Dan Bab V berisi Kesimpulan.